

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Saripah Nurfilah¹⁾, Sonyaruri Satiti²⁾

¹⁾Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture, Mulawarman University

²⁾Center for Population and Policy Studies, Universitas Gadjah Mada

Email: Saripahnurfilah@gmail.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah membawa berbagai dampak bagi kehidupan manusia, termasuk capaian pembangunan manusia. Beberapa negara di dunia diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan IPM, bahkan ada yang mengalami penurunan akibat pandemi. Indonesia juga tidak luput dari pandemi ini, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2020 tumbuh lebih lambat dari tahun sebelumnya. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan perlambatan pertumbuhan IPM selama pandemi COVID-19 terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan usia harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya belanja riil per kapita akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hanya naik 0,03 persen pada 2020 dibandingkan 2019. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan belanja per kapita akibat melemahnya perekonomian nasional.

Kata kunci : Covid-19, kualitas, manusia, Indonesia

Abstract

The COVID-19 pandemic that has hit the world has brought various impacts on human life, including human development achievements. Several countries in the world are estimated to experience a slowdown in HDI growth, some even experience a decline due to the pandemic. Indonesia is also not spared from this pandemic, Indonesia's HDI in 2020 grew slower than the previous year. This study is an analysis of secondary data on the Indonesian Human Development Index (HDI) issued by the Central Statistic Agency. The results of the study show that the challenges of slowing HDI growth during the COVID-19 pandemic were mainly caused by slowing growth in life expectancy and education, as well as declining real spending per capita as a result of the contraction of economic growth. Indonesia's Human Development Index (HDI) only rose 0.03 percent in 2020 compared to 2019. This was influenced by the decline in per capita spending due to the weakening of the national economy.

Keywords: COVID-19, quality, human, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan Human Development Report (HDR). Munculnya gagasan pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP tidak hanya menempatkan manusia sebagai input pembangunan tetapi juga menjadi tujuan akhir dari pembangunan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif sehingga mereka dapat berumur panjang dan sehat, menguasai pengetahuan, dan memenuhi standar hidup layak. Laporan Pembangunan Manusia juga memberikan rekomendasi untuk mengukur pembangunan manusia, yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak tahun 2014, Indonesia telah menerapkan metode penghitungan IPM terbaru untuk menghitung IPM yang disajikan secara berkala setiap tahun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semua indikator makroekonomi dan sosial juga mengalami tekanan berat, termasuk IPM. Pertumbuhan IPM Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan dengan hanya tumbuh sebesar 0,03 persen, jauh lebih lambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,74 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, sedangkan dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan diwakili oleh variabel Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (SLT) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat.

Perlambatan pertumbuhan IPM pada tahun 2020 juga dialami oleh seluruh provinsi. Dari sisi posisi, perbandingan IPM antarprovinsi tidak banyak berubah. Pencapaian IPM tertinggi masih diraih Provinsi DKI Jakarta (80,77), sedangkan pencapaian terendah diduduki Provinsi Papua (60,44). Jika dibandingkan dengan angka nasional, ada 11 provinsi yang memiliki capaian IPM di atas angka nasional. Pada tahun 2020 terdapat 24 provinsi yang mengalami peningkatan IPM, sedangkan 10 provinsi lainnya mengalami penurunan.

Jika dilihat dari persebaran pembangunan manusia, dalam satu dekade terakhir kesenjangan

capaian pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia sudah mulai berkurang, meskipun dengan laju yang relatif lambat. Pada periode 2010-2020, perbedaan IPM antar provinsi jauh lebih rendah dibandingkan perbedaan IPM kabupaten/kota. Namun, penurunan perbedaan di tingkat kabupaten/kota lebih terlihat.

Peningkatan pembangunan manusia memerlukan upaya yang tepat dan terkoordinasi serta saling mendukung antar bidang. Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia menjadi tantangan bagi pembangunan manusia di Indonesia. Oleh karena itu, kebersamaan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Sejak tahun 2014 angka IPM di Indonesia disajikan secara berkala setiap tahun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sesuai dengan status pencapaiannya. Pengelompokannya adalah: 1. sangat tinggi: IPM 80; 2. tinggi : 70 IPM < 80; dan 3. sedang : 60 IPM < 70 4. rendah : IPM < 60.

Perhitungan IPM di Indonesia dimulai pada tahun 1996. Saat itu IPM dihitung secara periodik setiap tiga tahun sekali. Namun, sejak tahun 2004, IPM telah dihitung secara berkala setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, terutama dalam menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam menghitung IPM di Indonesia mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Metode penghitungan IPM yang baru telah diterapkan di Indonesia sejak tahun data 2014 dan untuk memenuhi ketersediaan data tahun sebelumnya dilakukan backasting untuk periode data 2010-2013.

Pada tahun 1990 UNDP membentuk tiga dimensi untuk membentuk IPM. Ketiga dimensi tersebut merupakan pendekatan yang dipilih dalam menggambarkan kualitas hidup manusia dan tidak berubah hingga saat ini. Dimensi tersebut meliputi: (1) panjang umur dan sehat; (2) pengetahuan (knowledge); dan (3) taraf hidup yang layak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

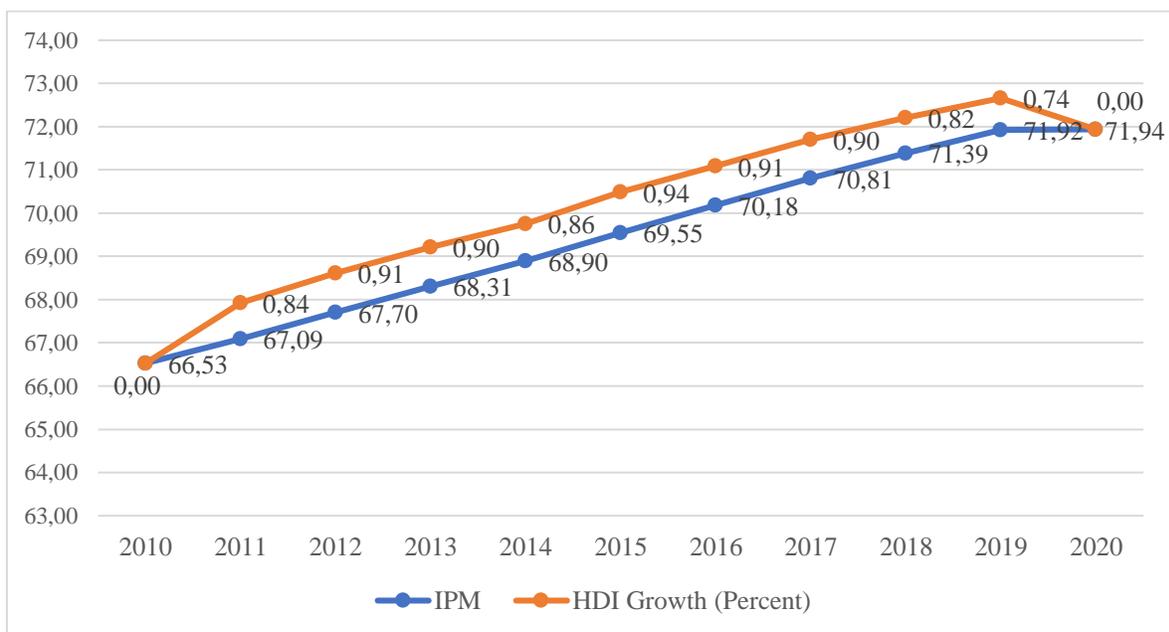
Prestasi Pembangunan Manusia Indonesia

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara telah mengakibatkan resesi global. Beberapa lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 akan mengalami kontraksi pada kisaran 3,4-4,3 persen. Indonesia juga tidak terlepas dari pandemi ini dan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama disebabkan oleh penurunan output kegiatan ekonomi yang proses produksi dan transaksinya banyak berinteraksi langsung dan menimbulkan keramaian. Pandemi COVID-19 setidaknya telah mempengaruhi perekonomian melalui beberapa jalur eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, dampak pandemi dipicu oleh penurunan permintaan barang dan jasa dari negara mitra dagang, penurunan harga komoditas, stagnasi rantai pasokan komoditas input produksi, dan penurunan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Secara internal, dampak pandemi dipicu oleh penurunan aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi akibat pembatasan aktivitas dan interaksi yang bertujuan untuk mencegah penularan virus. Semua faktor ini berinteraksi satu sama lain dan secara keseluruhan memberikan tekanan berat pada perekonomian.

Pembangunan Indonesia Melambat Selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan edukasi yang dilakukan secara tatap muka sebelum pandemi kini dilakukan secara virtual. Pemberian beberapa layanan kesehatan konsultatif juga banyak dilakukan melalui telepon atau komunikasi online. Transaksi langsung dan kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan keramaian juga banyak dihindari.

Semua indikator makroekonomi dan sosial juga mengalami tekanan berat, termasuk IPM. Pada tahun 2020, IPM Indonesia mencapai 71,94, tumbuh 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan manusia di Indonesia masih tergolong tinggi (berkisar antara 70 IPM < 80). Pertumbuhan IPM pada tahun 2020 jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,74 persen (Gambar 1). Selama kurun waktu 2010-2019, pembangunan manusia di Indonesia setiap tahunnya tumbuh rata-rata 0,89 persen per tahun. Namun dengan pertumbuhan yang melambat pada 2020, rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2020 akan menjadi 0,78 persen per tahun.



Gambar 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2020
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

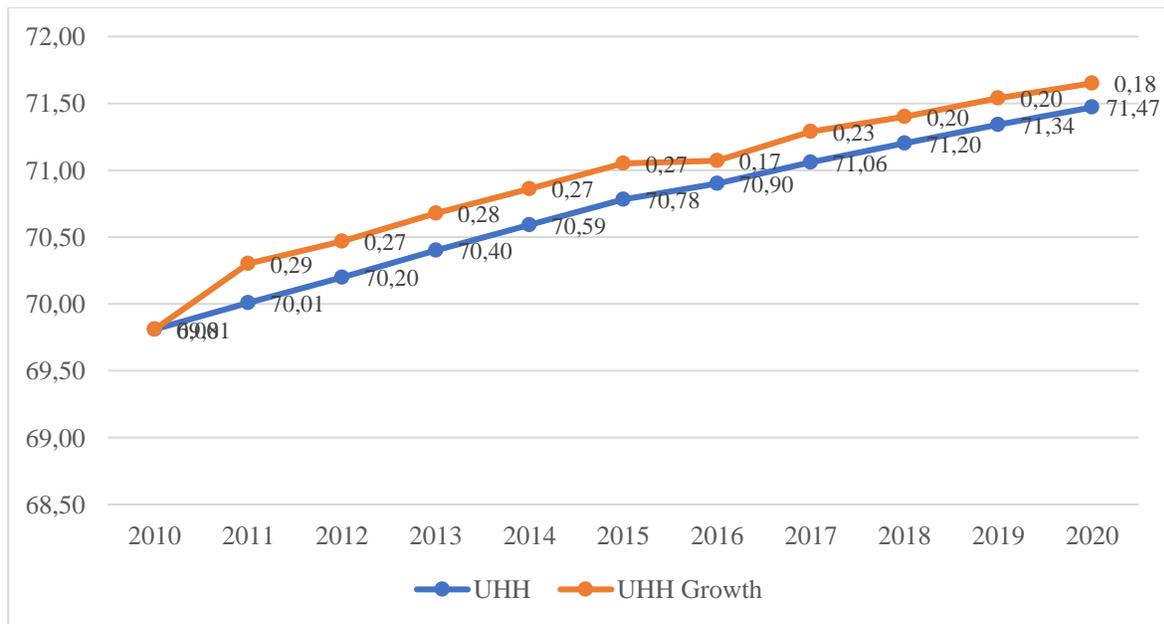
Perlambatan IPM pada masa pandemi COVID disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, sedangkan dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan diwakili oleh variabel Angka Harapan Hidup pada kelahiran (UHH) dan Tahun Harapan Sekolah. (SLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

Pencapaian Dimensi Panjang Umur dan Hidup Sehat Pertumbuhan Melambat

Angka harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk dapat hidup lebih lama. Secara tidak langsung, hal ini juga

mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), status kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahun, sedangkan Angka Harapan Hidup (UHH) dapat menunjukkan angka kematian dalam hal usia harapan hidup. Pada tahun 2020, pencapaian UHH Indonesia adalah 71,47 tahun atau meningkat 0,18 persen (0,13 tahun) dibandingkan tahun 2019. Meski ada peningkatan UHH, namun ada sedikit perlambatan dibandingkan 3 tahun sebelumnya yang masing-masing tumbuh 0,23 persen. (0,16 tahun), 0,20 persen (0,14 tahun), dan 0,20 persen (0,14 tahun).



Gambar 2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Indonesia, 2010-2020 (Sumber : Badan Pusat Statistik)

Sedangkan angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi angka kesakitan maka semakin rendah derajat kesehatan penduduk karena semakin banyak masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh berbagai penyebab. Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada angka kematian dan harapan hidup.

Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020, angka kesakitan penduduk

Indonesia pada tahun 2020 sebesar 14,64 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 15,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Indonesia semakin membaik dalam satu tahun terakhir.

Teori Henrik L. Blum juga menjelaskan bahwa angka kematian dan kesakitan penduduk dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan (Gambar 2). Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan

yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodihardjo et al, 1997). Faktor lingkungan berpengaruh sebesar 45 persen, perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan faktor keturunan sebesar 5 persen.

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam menunjang derajat kesehatan antara lain kepemilikan tempat buang air besar dan akses terhadap air minum yang layak. Data statistik kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020 menunjukkan terdapat 6,08 persen rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki fasilitas buang air besar. Angka ini membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,47 persen (turun 1,39 persen). Meski membaik, penurunan tersebut masih lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,78 persen. Data statistik kesejahteraan masyarakat tahun 2020 juga menunjukkan rumah tangga yang memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2020 sebesar 90,21 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 89,27 persen (meningkat 0,94 persen). Namun, meski mengalami peningkatan, peningkatan tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,52 persen.

Faktor selanjutnya yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat adalah perilaku hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang menurut teori Henrik L. Blum masing-masing menyumbang 30 persen dan 20 persen. Salah satu indikator perilaku sehat adalah pernikahan dini yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2020 terdapat 14,88 persen wanita pernah kawin dengan usia kawin pertama 16 tahun. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,48 persen (menurun 0,60 persen). Penurunan tersebut lebih cepat dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,18 persen. Sedangkan indikator pelayanan kesehatan yang mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan antara lain siapa dan dimana penolong persalinan. Pada tahun 2020 terdapat 4,87 persen wanita pernah kawin yang kelahiran terakhirnya tidak ditolong oleh tenaga medis. Angka ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,28 persen (turun 0,41 persen). Namun peningkatan tersebut lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,10 persen. Indikator selanjutnya adalah wanita pernah kawin yang terakhir kali melahirkan di fasilitas kesehatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 12,11 persen. Angka

ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 14,06 persen (turun 1,95 persen), namun peningkatannya lebih lambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,20 persen.

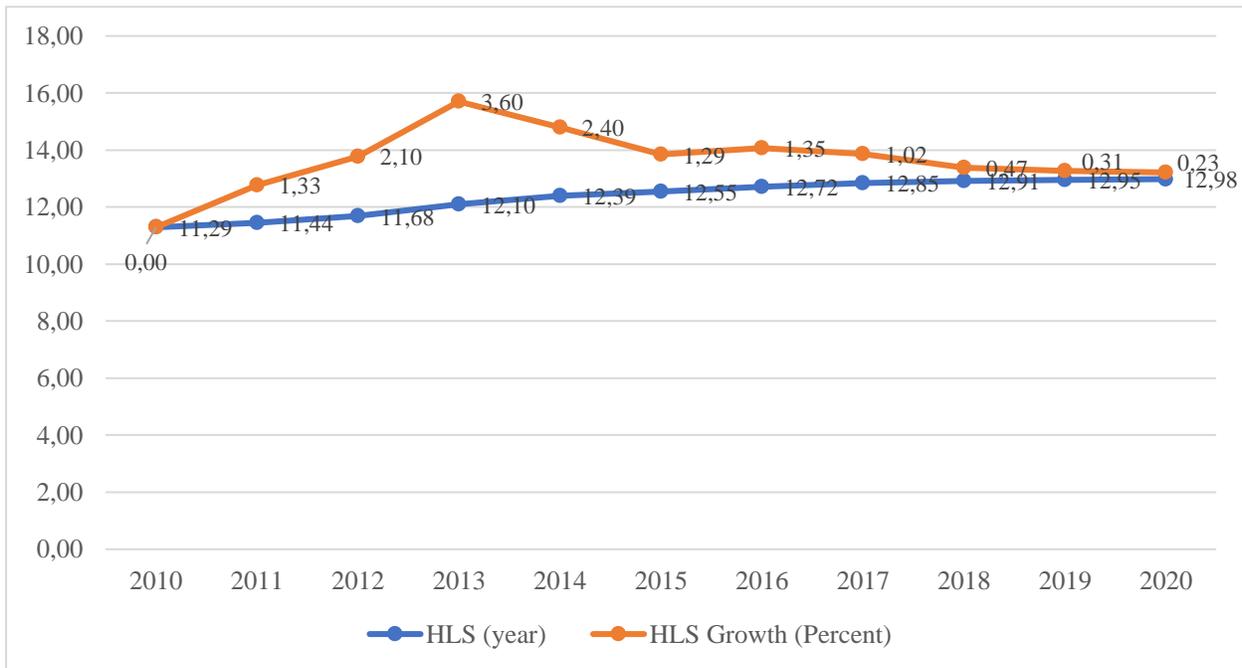
Secara umum dapat dikatakan bahwa indikator kesehatan yang dapat berdampak pada peningkatan usia harapan hidup pada masa pandemi COVID-19 masih menunjukkan perbaikan, namun peningkatannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pada akhirnya peningkatan UHH di 2020 juga melambat. Peningkatan UHH juga berperan positif dalam peningkatan IPM di masa pandemi.

Pencapaian Dimensi Pengetahuan Tumbuh Melambat

Dimensi pengetahuan dalam menghitung IPM terdiri dari dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (SLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS adalah perkiraan lama sekolah (dalam tahun) yang akan dihadiri oleh anak berusia 7 tahun. HLS dihitung berdasarkan jumlah penduduk berusia 7 tahun ke atas agar sesuai dengan acuan usia dalam program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. Sedangkan RLS adalah rata-rata lama waktu yang dihabiskan penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Cakupan penduduk untuk menghitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa proses pendidikan seseorang telah berakhir sebelum mencapai usia 25 tahun. Perhitungan RLS berdasarkan penduduk berusia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

HLS merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan suatu program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator keluaran pembangunan dalam jangka panjang. HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang penambahan (flow) dan pencapaian (stock) kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

Selama tahun 2010 hingga 2020, kedua indikator tersebut selalu mengalami peningkatan. Meski indikator HLS terus meningkat, namun sejak 2014 cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2020 HLS hanya meningkat sebesar 0,23 persen (0,03 tahun), sedikit lebih lambat dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya yang mencapai 0,31 persen (0,04 tahun) (Gambar 3).



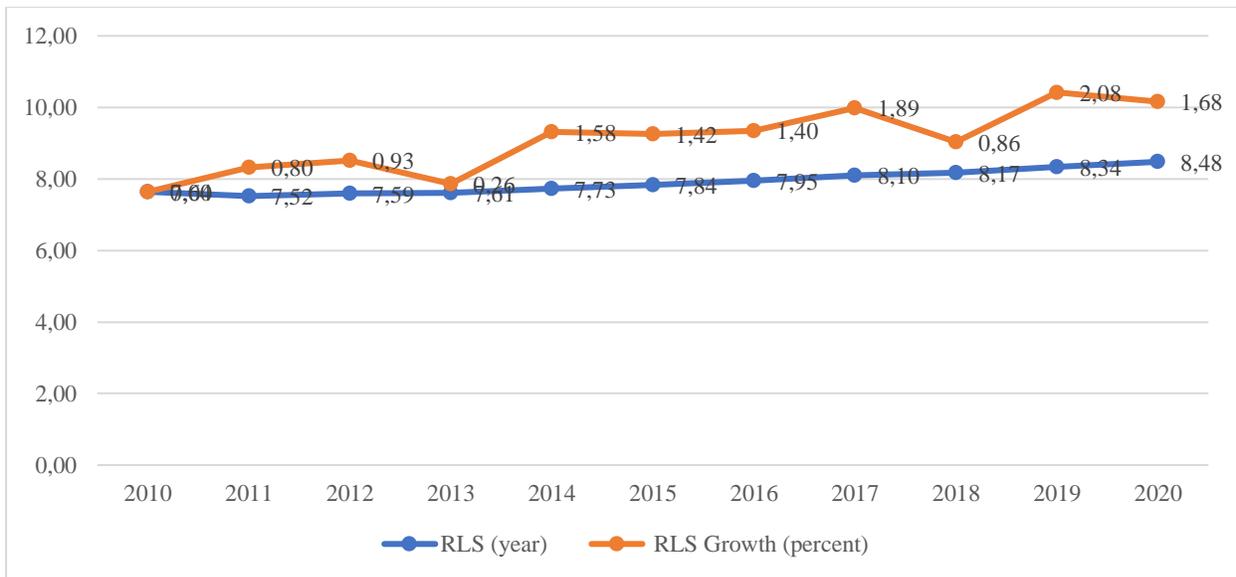
Gambar 3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (SLTA) Indonesia, 2010-2020
(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Peningkatan HLS pada tahun 2020 dipengaruhi oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua kelompok usia pendidikan, yaitu 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada APS 16-18 tahun (0,36 persen), disusul APS 19-24 tahun (0,34 persen), kemudian APS 7-12 tahun (0,02 persen). Rendahnya peningkatan APS 7-12 lebih karena pada kelompok usia ini nilainya sudah sangat tinggi (hampir mendekati 100 persen) sehingga ruang untuk perbaikan sangat sempit.

Yang perlu diperhatikan adalah rendahnya APS 19-24 tahun yang masih di bawah 30 persen. Padahal kelompok usia ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan dan jumlah daya tampung perguruan tinggi yang lebih sedikit dibandingkan jumlah lulusan SMA. Selain itu, hal lain yang juga berpengaruh adalah

tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.

Indikator RLS pada masa pandemi juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 8,34 tahun pada 2019 menjadi 8,48 tahun pada 2020 atau meningkat 1,68 persen (0,14 tahun). Peningkatan ini lebih lambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,08 persen (0,17 tahun). Secara alami, peningkatan RLS sangat dipengaruhi oleh peningkatan APS pada kelompok usia 19-24 tahun, terutama APS pada kelompok usia 24 tahun. Terkait dengan hal tersebut, upaya peningkatan dimensi pendidikan dapat difokuskan pada peningkatan APM kelompok usia 19-24 tahun karena secara bersamaan dapat meningkatkan indikator HLS dan RLS.

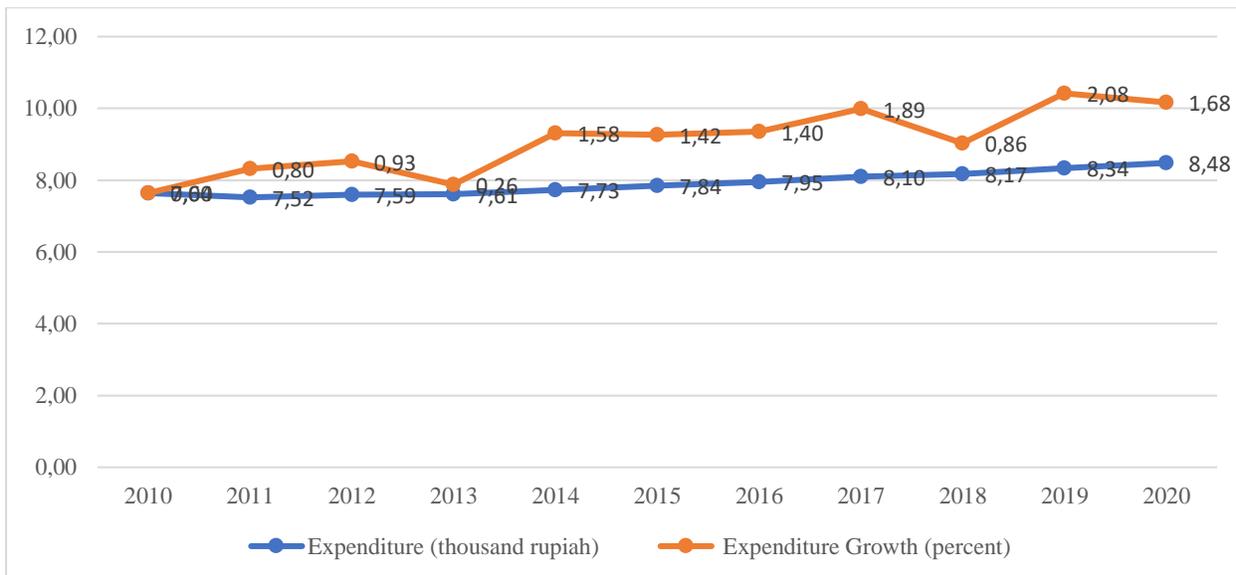


Gambar 4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia, 2010-2020
(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Pencapaian Dimensi Standar Hidup Layak Turun Akibat Pandemi

Dimensi standar hidup layak tercermin dari penyesuaian indikator pengeluaran per kapita riil per tahun. Indikator ini menggambarkan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Selama 2010-2019, indikator ini selalu tumbuh dengan pertumbuhan rata-rata 2,02 persen per tahun,

namun pada periode 2010-2020 turun menjadi 1,73 persen per tahun akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 belanja riil per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp11.013.000, mengalami kontraksi sebesar 2,53 persen (turun Rp286.000) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini bahkan lebih rendah dari capaian 2018 sebesar Rp. 11.059.000 (Gambar 5).



Gambar 5. Perkembangan Pengeluaran Riil Disesuaikan per Kapita di Indonesia, 2010-2020
(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan

penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang bekerja 128,45 juta orang, turun 0,31 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya (128,76 juta orang), sedangkan angka TPT mencapai 7,07 persen, meningkat 1,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,23 persen. . Pandemi COVID-19 juga menurunkan persentase pekerja formal dari 44,12 persen di tahun 2019 menjadi 39,53 persen di tahun 2020 yang di sisi lain meningkatkan persentase pekerja informal karena kebutuhan untuk bertahan hidup di masa pandemi yang salah satunya dilakukan dengan beradaptasi dan beralih ke pekerja informal.

Penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan TPT selama pandemi berdampak pada peningkatan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 saat pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia mencapai 26,42 juta (9,78 persen), lebih tinggi dari kondisi sebelumnya dan pada September 2020 meningkat lagi menjadi 27,55 juta (10,19 persen). Selain itu, penurunan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan TPT juga berdampak pada penurunan Belanja Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mengalami kontraksi 2,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan penurunan inflasi dari 2,72 persen pada tahun 2019 menjadi 1,68 persen pada tahun. 2016. 2020.

Pertumbuhan IPM Provinsi Melambat

Pertumbuhan IPM di tengah pandemi COVID-19 melambat di semua provinsi. Dari sisi posisi, perbandingan IPM antarprovinsi tidak banyak berubah. Pencapaian IPM tertinggi pada tahun 2020 masih diraih oleh Provinsi DKI Jakarta (80,77), sedangkan pencapaian terendah diduduki oleh Provinsi Papua (60,44). Jika dibandingkan dengan angka nasional, ada 11 provinsi yang memiliki capaian IPM di atas angka nasional.

Sejak pertama kali dihitung, Provinsi DKI Jakarta selalu memiliki capaian IPM tertinggi. Selama pandemi COVID-19, IPM Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan terendah dalam satu dekade terakhir dengan kenaikan 0,01 poin. Perlambatan IPM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan belanja per kapita riil yang disesuaikan. Indikator ini mengalami penurunan sebesar 1,62 persen dibandingkan tahun 2019. Banyaknya kasus terkonfirmasi COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap perlambatan angka IPM Provinsi DKI Jakarta. Hingga akhir tahun 2020, kasus positif COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta menjadi

yang tertinggi di Indonesia dengan kontribusi 25 persen dari seluruh kasus.

Di sisi lain, Provinsi Papua menempati posisi terakhir dalam pencapaian pembangunan manusia pada periode 2010-2020. Selain itu, IPM Provinsi Papua pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi yang telah menyebar hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Faktor utama penurunan IPM di provinsi ini adalah penurunan penyesuaian pengeluaran per kapita riil. Hal ini sejalan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terus menurun dari triwulan II-2020 hingga akhir triwulan IV-2020 (BPS, 2021a). Padahal, penurunan konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang negatif merupakan tanda dari melemahnya perekonomian dan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh pada aspek pembangunan lainnya. Beberapa provinsi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, dan sebagian besar mengalami pertumbuhan negatif.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia. Namun karena pembangunan manusia bersifat jangka panjang, maka IPM di sebagian besar provinsi hanya tumbuh melambat dan tidak mengalami kontraksi seperti pertumbuhan ekonomi. Selain itu, indikator pembentuk IPM lainnya juga masih mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2020 terdapat 24 provinsi yang mengalami peningkatan IPM meskipun peningkatannya lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Peningkatan IPM tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat, masing-masing sebesar 0,60 persen dan 0,58 persen. Di tengah pandemi COVID-19, IPM kedua provinsi secara keseluruhan masih meningkat karena dampak pandemi terhadap daya beli di provinsi tersebut masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain sehingga penurunan tersebut dikompensasi dengan peningkatan indikator pembentuk IPM lainnya. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas di kedua provinsi tersebut meningkat signifikan dibandingkan provinsi lain dengan persentase kenaikan masing-masing mencapai 2,15 persen dan 2,07 persen, sedangkan peningkatan RLS nasional mencapai 1,68 persen.

Rendahnya dampak pandemi terhadap daya beli di provinsi tersebut tercermin dari indikator ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Kenaikan TPT di Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat sebesar 0,37 dan 0,34 poin persentase (BPS, 2020), sedangkan kenaikan TPT nasional sebesar 1,84 poin persentase. Selain itu, persentase penduduk miskin di kedua provinsi tersebut mengalami penurunan (0,80 dan 0,15 poin persentase), sedangkan secara nasional angka kemiskinan meningkat sebesar 0,37 poin persentase.

Selain ditandai dengan peningkatan capaian IPM di 24 provinsi, perkembangan IPM pada tahun 2020 juga tercatat mengalami penurunan di sepuluh provinsi. Penurunan IPM tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2019 IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 71,15, sedangkan pada tahun 2020 turun 0,73 persen menjadi 70,63. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terganggunya dimensi taraf hidup layak yang tidak dapat dikompensasi oleh indikator lambatnya pertumbuhan pada dimensi lain. Penurunan standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita riil di Kalimantan Utara juga disertai dengan penurunan PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar 4,49 persen, jauh lebih dalam dibandingkan penurunan PDRB per kapita di 34 provinsi (rata-rata) yang mencapai 3,15 persen (BPS, 2021b) dan (2) peningkatan persentase pekerja yang bekerja 0 jam (saat tidak bekerja) sebesar 1,17 poin persentase, sedangkan angka nasional mencapai 0,75 poin persentase. Selain itu,

Provinsi Kalimantan Utara juga tercatat sebagai provinsi tertinggi kedua dengan persentase pekerja sementara yang tidak bekerja, yaitu 4,5 persen (BPS, 2020).

Hal yang hampir sama juga terjadi di Provinsi Papua. Penurunan IPM Provinsi Papua juga disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita riil yang juga tercermin dari penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,58 persen (BPS, 2021a). Indikator lain yang berkontribusi terhadap penurunan IPM di Provinsi Papua adalah melambatnya pertumbuhan RLS. Jika pada tahun 2019 pertumbuhan RLS mencapai 1,99 persen, maka pada tahun 2020 RLS Provinsi Papua hanya tumbuh 0,60 persen, cukup jauh dari pertumbuhan nasional yang mencapai 1,68 persen.

Tidak jauh berbeda dengan Provinsi Papua, penurunan IPM di Provinsi Kalimantan Timur juga tidak terlepas dari penurunan daya beli akibat pandemi dan perlambatan pertumbuhan RLS. Penurunan daya beli di Provinsi Kalimantan Timur juga ditandai dengan turunnya beberapa indikator lainnya, seperti: (1) penurunan persentase pekerja formal sebesar 6,32 poin persentase, jauh lebih tinggi dari rata-rata yang hanya 4,59 poin persentase (BPS, 2020); (2) penurunan upah rata-rata sebesar 6,81 persen, sedangkan penurunan nasional sebesar 5,41 persen (BPS, 2020); dan (3) penurunan PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar 4,68 persen, sedangkan penurunan total 34 provinsi sebesar 3,15 persen (BPS, 2021b). Provinsi lain yang mengalami penurunan IPM menunjukkan gambaran serupa, terutama terkait melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Tabel 1. Provinsi dengan Penurunan IPM Tahun 2020

Provinsi	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per kapita (Ribuan Rupiah)		IPM	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kalimantan Utara	72.54	72.59	12.84	12.93	8.94	9.00	9.343	8.756	71.15	70.03
Papua	65.65	65.79	11.05	11.08	6.65	6.69	7.336	6.954	60.84	60.44
Kalimantan Timur	74.22	74.33	13.69	13.72	9.70	9.77	12.359	11.728	76.61	76.24
Riau	71.48	71.60	13.14	13.20	9.03	9.14	11.255	10.675	73.00	72.71
Maluku Utara	68.18	68.33	13.63	13.67	9.00	9.04	8.308	8.032	68.70	68.49
Sulawesi Utara	71.58	71.69	12.73	12.85	9.43	9.49	11.115	10.791	72.99	72.93
Nusa Tenggara Timur	66.85	67.01	13.15	13.18	7.55	7.63	7.769	7.598	65.23	65.19
DI Yogyakarta	74.92	74.99	15.58	15.59	9.38	9.55	14.394	14.015	79.99	79.97
Sumatera Barat	69.31	69.47	14.01	14.02	8.92	8.99	10.925	10.733	72.39	72.27
Sumatera Selatan	69.65	69.88	12.39	12.45	8.18	8.24	10.937	10.652	70.02	70.01

4. KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional 2020 hanya tumbuh 0,03 persen atau cenderung tidak mengalami kemajuan menjadi 71,94 dari tahun lalu 71,92. BPS juga mencatat IPM sepuluh daerah yang mengalami penurunan tahun ini, yaitu: Kalimantan Utara, Papua, Kalimantan Timur, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.

Rendahnya pertumbuhan IPM nasional tahun ini dipengaruhi oleh penurunan komponen belanja per kapita atas dasar penyesuaian harga konstan 2021 (Paritas Daya Beli/PPP). PPP Indonesia tahun ini Rp 11 juta, turun 2,53 persen dibandingkan 2019. Penurunan PPP tahun ini menghentikan tren kenaikan selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2010, PPP tercatat sebesar Rp. 9,64 juta dan secara bertahap meningkat hingga tahun lalu mencapai Rp. 11,299 juta. Hal ini sejalan dengan melemahnya perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Indonesia berada dalam resesi setelah ekonomi tahun ini tumbuh negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia juga meningkat selama pandemi COVID-19. Pada Maret 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,78 persen atau setara dengan 26,42 juta orang. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak September 2017. Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 4,94 persen atau 7 juta orang menganggur pada Agustus 2019 menjadi 7,07 persen atau 9,8 juta orang pada Agustus 2020.

Komponen Harapan Tahun Pelajaran (SLB) penduduk usia 7 tahun, berdasarkan catatan BPS, hanya meningkat 0,03 tahun dari 12,95 tahun menjadi 12,98 tahun. Kemudian, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas hanya meningkat 0,14 tahun dari 8,34 tahun menjadi 8,48 tahun. Pertumbuhan HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan nasional tahun ini tidak mulus. Kondisi ini disebabkan oleh penerapan metode pembelajaran jarak jauh yang belum efektif menjangkau seluruh siswa di Indonesia. Ada sejumlah kendala yang dihadapi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi, di antaranya tidak bisa mengatur waktu belajar, kesulitan memahami mata pelajaran, dan tidak memahami instruksi guru. Masalah pendidikan

lainnya adalah potensi anak putus sekolah akibat menurunnya pendapatan orang tua di masa pandemi. Untuk tetap bertahan, mereka menggunakan strategi ekstrem, termasuk menyerahkan anak-anak mereka untuk bekerja. Langkah ini berpotensi membuat anak putus sekolah. Beberapa guru yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh bersedia menyesuaikan kurikulum dengan tingkat belajar siswa.

Komponen terakhir adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) yang meningkat 0,13 tahun dibandingkan 2019 menjadi 71,47 tahun pada 2020. Artinya, usia harapan hidup masyarakat Indonesia hanya sampai 72 tahun. Pertumbuhan ini cenderung stagnan jika dibandingkan tahun 2018 hingga 2019 yang meningkat 0,14 tahun.

Berdasarkan data di atas, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan pascapandemi COVID-19. Terutama di Luar Jawa yang selama ini tertinggal, seperti Papua dan Papua Barat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta (ID). BPS.
- H. Preston, Samuel, et. all. 2004. Demography: Measuring and Modelling Population Processes. USA: Blackwell.
- Kasnodihardjo. 1997. Gambaran Perilaku Penduduk Mengenai Kesehatan Lingkungan di Daerah Pedesaan Subang Jawa Barat. Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Cermin Dunia Kedokteran No. 119, 1997.
- Pemerintah RI. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pemerintah RI.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021, April 11). KPCPEN. Retrieved from <https://covid19.go.id/peta-risiko>.
- Todaro, Michel P. dan Stephen C. Smith, 2003. Economic Development/Eighth Edition, Newyork: Pearson.
- United Nations Development Programme. (1990). Human Development Report 1990. New York: UNDP.
- _____. (2020). HUMAN DEVELOPMENT PERSPECTIVES. COVID-19 AND HUMAN DEVELOPMENT: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery.

Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Volume 13, No. 1, Bulan Juni Tahun 2022, hlm. 18-27

P-ISSN: 2087-0493 E-ISSN: 2715-5994